



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Sekretariat Kabinet

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja instansi guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum membantu tugas Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan dukungan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020.

LKj disusun untuk menyampaikan informasi terkait pencapaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang transparan dan akuntabel. Penyusunan LKj berlandaskan pada Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024. Selama tahun 2023, secara umum Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dapat mencapai sasaran strategis dengan baik di tengah masa transisi pandemi Covid-19 meskipun terdapat tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pekerjaan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada *stakeholder* dan masukan dalam pelaksanaan kinerja agar dapat meningkatkan kinerja yang akuntabel di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2024
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan
Pekerjaan Umum,



Hennie Ambar Susilowati

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
Ringkasan Eksekutif	5
BAB I Pendahuluan	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	6
C. Analisa SWOT	10
BAB II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	11
B. Rencana Kerja dan Anggaran.....	13
C. Uraian Perjanjian Kinerja	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Kinerja	19
1. Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	23
2. Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	24
3. Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	25
4. Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	26
5. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum.....	27
6. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum.....	27
B. Realisasi Anggaran.....	27
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja.....	30
BAB IV Kesimpulan	31
Lampiran 1 : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023	32
Lampiran 2 : Matriks Capaian Kinerja	33
Lampiran 3 : Matriks Penyerapan Anggaran	35
FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI NOMOR 4 TAHUN 2018	36

Daftar Tabel

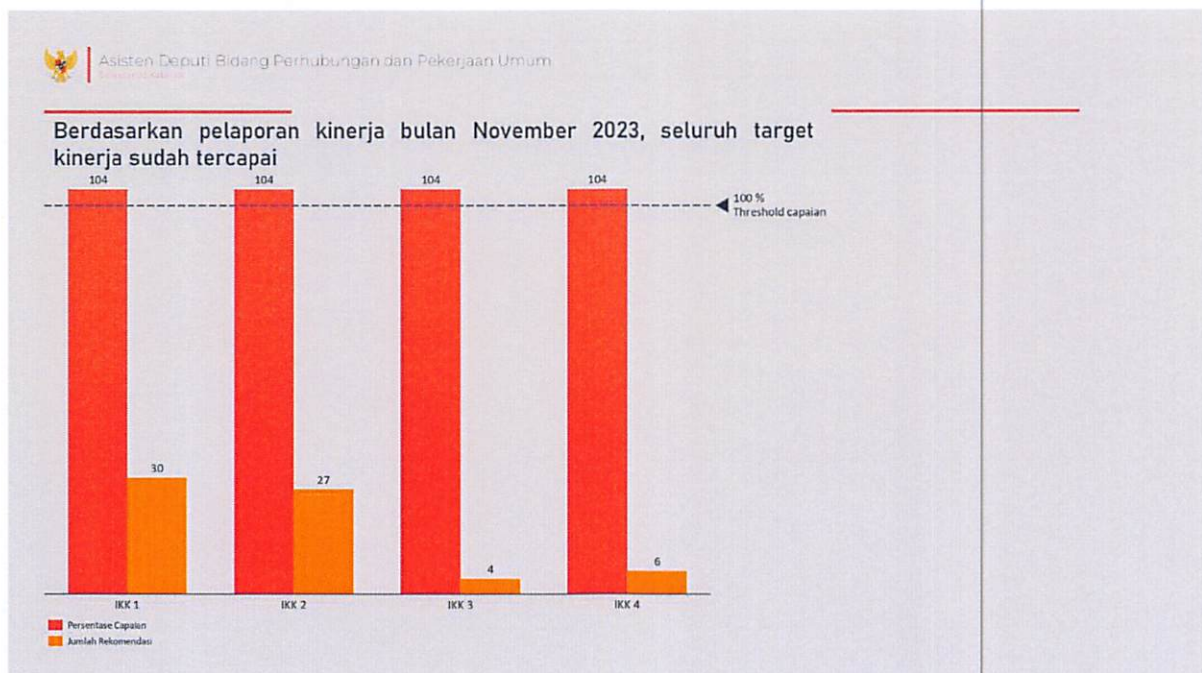
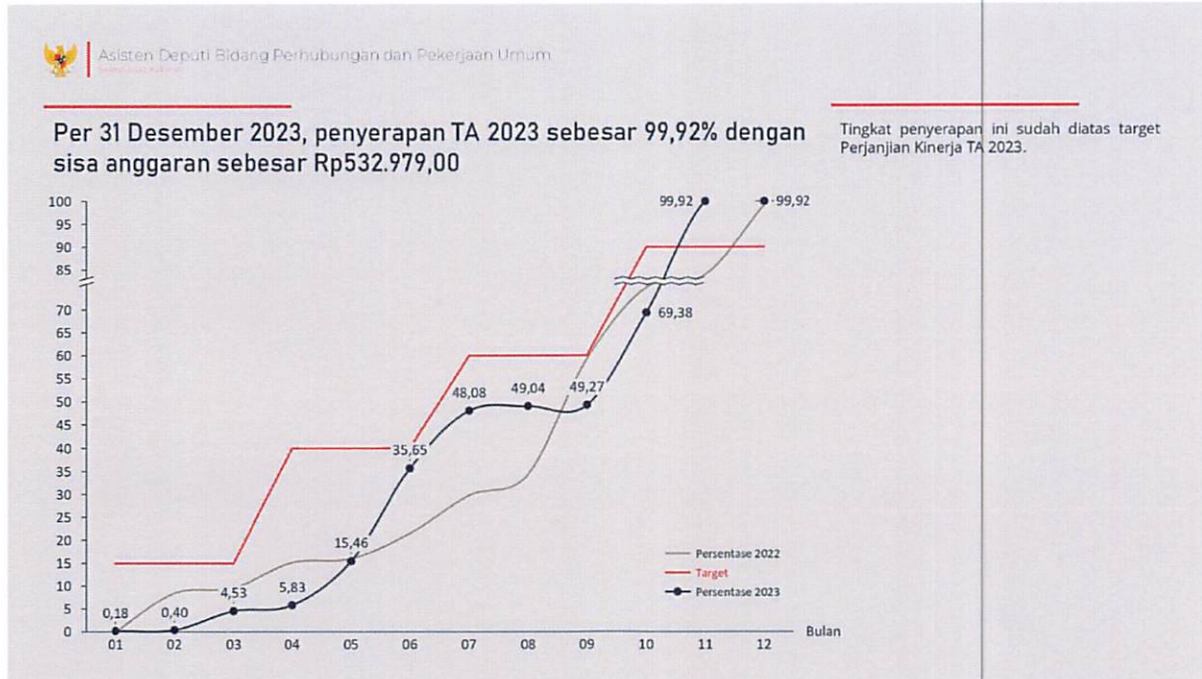
Tabel 1 : Aspek Strategis Berdasarkan Renstra 2020-2024	7
Tabel 2 : Informasi Perubahan SDM	9
Tabel 3 : Matriks SWOT	10
Tabel 4 : Target Kinerja Renstra 2020-2024	12
Tabel 5 : Matriks Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023 Berdasarkan Renstra 2020-2024 13	
Tabel 6 : Persandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2023	16
Tabel 7 : Uraian Perjanjian Kinerja dan Anggaran.....	17
Tabel 8 : Matriks Capaian Kinerja	19
Tabel 9 : Matriks Capaian IRO TA 2022.....	21
Tabel 10 : Matriks Rekomendasi IRO 1	23
Tabel 11 : Matriks IRO 2	24
Tabel 12 : Matriks IRO 3	25
Tabel 13 : Matriks IRO 4	26
Tabel 14 : Matriks Realisasi Anggaran.....	28

Daftar Gambar

Gambar 1 : Tren Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran	29
Gambar 2 : Tangkapan Layar Dashboard SIKT	30

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Ringkasan Eksekutif



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh Pengguna Anggaran diminta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Dalam laporan tersebut menyajikan ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN.

Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Kabinet juga wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun anggaran. Laporan Kinerja dimaksud kemudian disampaikan kepada pimpinan unit organisasi sebagai bahan penyusunan tingkat unit organisasi.

Laporan kinerja tahunan ini akan menyajikan ringkasan tentang keluaran (output) dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam pelaksanaan APBN. Laporan tersebut paling sedikit berisi:

- a. Pencapaian tujuan dan Sasaran;
- b. Realisasi pencapaian target Kinerja;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
- d. Perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum merupakan unit kerja Eselon II dibawah Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang memiliki tanggungjawab untuk membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.

Berlandaskan hal tersebut diatas, mengingat posisi yang strategis tersebut, maka Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum memiliki andil dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada pimpinan. Gambaran lebih detail terkait aspek strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 1 : Aspek Strategis Berdasarkan Renstra 2020-2024

Aspek Strategis	Berdasarkan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024
Visi	Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang adaptif, inovatif, dan profesional dalam membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi kinerja seluruh pejabat dan staf berdasarkan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diukur beban kerja masing-masing pejabat dan staf; 2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain seperti pembangunan <i>database</i> internal; 3. Meningkatkan koordinasi dan <i>networking</i> khususnya dengan K/L mitra utama dan K/L pendukung dan pemerintah daerah dengan variasi tingkatan yang beragam; serta 4. Mengutamakan koordinasi yang baik dan lancar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keasdepan
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum 2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Terkait aspek sumber daya manusia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bidang, yaitu 2 untuk sektor perhubungan dan 1 untuk sektor pekerjaan umum. Kemudian, masing-masing kepala bidang dibantu oleh kepala subbidang dan analis.

Untuk tahun 2023, terdapat perubahan sumber daya manusia pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 2 : Informasi Perubahan SDM

No.	Nama	NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Pangkat/Golongan Lama	Pangkat/Golongan Baru
1	Romi Fajar Ali, S.H., M.H.	198804242010121006	Kepala Subbidang Perhubungan Darat	Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	Penata Tk. I (III/d)	Penata Tk. I (III/d)
2	Hami Prabowo, S.E.	199302132018011001	Analisis Perekonomian pada Subbidang Pekerjaan Umum	Kepala Subbidang Pekerjaan Umum	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Muda Tk. I (III/b)
3	Dwi Wahyuni Susinawanti, S.E., MDEC.	198704112009012001	Kepala Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Media	Kepala Subbidang Perhubungan Darat	Penata Tk. I (III/d)	Penata Tk. I (III/d)
4	Mela Meilania, S.AP.	198105252009122002	Kepala Subbidang Perkeretaapian	Kepala Subbidang Perkeretaapian	Penata (III/c)	Penata Tk. I (III/d)
5	Ayuning Tirta Parameswari, S.H.	199310172018012001	Analisis Hukum pada Subbidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Analisis Hukum pada Subbidang Perhubungan Laut	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Muda Tk. I (III/b)
6	Sintong Martunas M Simanullang, S.Ak.	199608022020121013	Analisis Perekonomian pada Subbidang EBTKE	Analisis Perekonomian pada Subbidang Pekerjaan Umum	Penata Muda (III/a)	Penata Muda (III/a)

C. Analisa SWOT

Tabel 3 : Matriks SWOT

Internal		Eksternal	
Strength	Weakness	Opportunities	Threats
Sebagai bagian dari unit kerja yang bertanggungjawab sebagai manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum memiliki kekhususan dalam menangani persoalan yang berhubungan dengan bidang perhubungan dan pekerjaan umum;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data yang sangat besar 2. Jumlah staf yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 	Presiden menaruh perhatian dalam penyelesaian pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia	Beragamnya permasalahan dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia membutuhkan pemahaman yang mendalam

BAB II
Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Sebagai unit kerja Eselon II di bawah pimpinan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum juga memiliki kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) guna mendukung tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional¹ antara lain mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Lebih lanjut Renstra Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum tahun 2020-2024 disusun berpedoman dan diarahkan untuk mendukung perwujudan visi Presiden, 7 (tujuh) misi pembangunan, dan agenda prioritas Kabinet Indonesia Maju yang kemudian dikenal dengan "Nawacita".

Renstra Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan serta lebih menitikberatkan pada hasil daripada kegiatan administrasi dan output.

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 4 : Target Kinerja Renstra 2020-2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%
		2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%
Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%
		4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

B. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Kertas Kerja Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum, terdapat beberapa target kinerja dan anggaran yang direncanakan khususnya pada tahun 2023.

Tabel 5 : Matriks Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023 Berdasarkan Renstra 2020-2024

URAIAN	TARGET KINERJA	TARGET PENDANAAN
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum		1.000.000.000
Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)		1.000.000.000
Kegiatan 1		
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407)		684.346.000
Sasaran Kegiatan 1		
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi		684.346.000
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1		
1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93%	
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93%	
KRO 1		
	12	
ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	rekomendasi kebijakan	684.346.000
RO 1		

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	TARGET KINERJA	TARGET PENDANAAN
001 Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	12 rekomendasi kebijakan	684.346.000
<i>Indikator RO 1</i>		
<i>Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	12 rekomendasi kebijakan	
Komponen		
539 Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet	3 Laporan	13.125.000
540 Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah	8 Laporan	605.405.000
541 Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	3 Laporan	65.816.000
Kegiatan 2		
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408)		315.654.000
Sasaran Kegiatan 2		
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi		315.654.000
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2		
<i>1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	93%	
<i>2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	93%	

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN		TARGET KINERJA	TARGET PENDANAAN
KRO 2			
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	9 rekomendasi kebijakan	315.654.000
RO 2			
001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	9 rekomendasi kebijakan	315.654.000
<i>Indikator RO 2</i>			
<i>Jumlah Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>		9 rekomendasi kebijakan	
Komponen			
547	Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	8 Laporan	315.654.000

C. Uraian Perjanjian Kinerja

Penetapan perjanjian kinerja ditujukan kepada setiap unit organisasi agar dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian-capaian kinerja dari setiap unit organisasi dengan target tertentu, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Sebagai langkah konkrit dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP khususnya dalam hal perbaikan perencanaan kinerja, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum berpartisipasi aktif dalam mengawal tindak lanjut hasil evaluasi yang diberikan oleh KemenpanRB terkait penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja.

Penyempurnaan yang dilakukan pada dokumen Perjanjian Kinerja yaitu:

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Rumusan sasaran pada setiap level Eselon II diubah menjadi lebih spesifik sesuai lingkup/bidang yang ditangani karena lingkup tanggung jawab Asisten Deputi terbatas pada bidang nomenklaturannya dan akan lebih memperlihatkan peran kontribusi setiap Asisten Deputi dalam menyokong kinerja atasannya;
2. Rumusan indikator kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja ditambahkan dengan rumusan “sesuai ketentuan”. Hal ini untuk dapat memperlihatkan objektivitas yang tinggi dari suatu pengukuran kinerja;
3. Penambahan 2 (dua) indikator kinerja baru yaitu indikator kinerja terkait indeks revisi anggaran dan indikator penyerapan anggaran. Adanya penambahan 2 (dua) indikator baru tersebut untuk lebih menunjukkan komitmen Asisten Deputi dalam hal perbaikan pengelolaan internal khususnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang efektif.

Dengan adanya penyempurnaan tersebut, berikut perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2023 beserta targetnya:

Tabel 6 : Persandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2022		Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (96%)
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (96%)
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (96%)

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2022		Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (96%)
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum (B)	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum (B)
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum (90%)		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum (90%)

Tabel 7 : Uraian Perjanjian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	Rp684.346.000,00
	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	3. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	Rp315.654.000,00
	4. Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Tabel 8 : Matriks Capaian Kinerja

Program	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)		
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407) 2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408) 		
Sasaran Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 		
Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%
3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang	96 %	100 %	104,17%

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Program	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)		
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407) 2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408) 		
Sasaran Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 		
Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan			
4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 %	100 %	104,17%
5. Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	B (5-8 kali revisi)	A (2 kali revisi)	
6. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	90% - Rp538.020.900,00	99,92% - Rp641.995.021,00 (pagu setelah optimalisasi)	111,02%

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 9 : Matriks Capaian IRO TA 2022

Indikator Rincian Output (IRO)		TA 2022			TA 2023		
		Target Output	Realisasi Output	Persentase Realisasi Output	Target Output	Realisasi Output	Persentase Realisasi Output
1	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	20	34	170%	10	10	100%
2	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	7	25	357%	2	2	100%
3	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	5	5	100%	6	6	100%
4	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	3	7	233%	3	3	100%
Total Dokumen		35	59		21	21	

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Seperti disampaikan dalam tabel sebelumnya, pada tahun 2023 kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum telah memenuhi target kinerja, dimana seluruh capaian mencapai angka 107,53%. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum juga telah menghasilkan **59 Rekomendasi** dari target **35 Rekomendasi**. Jumlah rekomendasi terbanyak pada rekomendasi terkait rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk rancangan peraturan menteri/kepala lembaga yang membutuhkan Persetujuan Presiden.

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum

Pada IRO 1 di tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum telah menghasilkan 10 Rekomendasi dengan berbagai topik/isu. Sebagian contoh rekomendasi IRO 1 sebagai berikut:

Tabel 10 : Matriks Rekomendasi IRO 1

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1.	Terdapat permasalahan terkait status aset lahan dan masih terdapat stasiun yang hanya memiliki 1 akses saja.	<p>Sekretariat Kabinet melalui surat nomor B.0376/MARVES/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 menyampaikan hasil pemantauan pengoperasian LRT Sumatera Selatan. Inti penyampaian tersebut terkait status aset lahan sedang dikoordinasikan oleh KPPIP, sedangkan terkait akses stasiun sedang dilakukan kajian DED. Selain hal tersebut, Sekretariat Kabinet juga merekomendasikan untuk mendorong keterlibatan Badan Usaha (misalnya melalui hak penamaan stasiun LRT atau bundling tiket pesawat) untuk meningkatkan jumlah pengguna LRT dan melakukan penataan integrasi antarmoda dengan LRT.</p> <p>Kemenko Marves sedang mengkaji masukan hasil pemantauan dari Sekretariat Kabinet.</p>
2.	Keterbatasan fasilitas container feeder dan jadwal kapal yang tidak pasti (akibat faktor cuaca dan muatan angkut yang minim)	<p>Sekretariat Kabinet melalui surat nomor B.0198/MARVES/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 menyampaikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Tol Laut di Aceh. Sekretariat Kabinet merekomendasikan agar Pemerintah Daerah berperan aktif untuk meningkatkan jumlah muatan balik melalui peningkatan potensi daerah.</p> <p>Kemenko Marves sedang mengkaji masukan hasil pemantauan dari Sekretariat Kabinet.</p>
3.	Masih terdapat bendungan PSN yang selesai dibangun akan tetapi belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber irigasi.	<p>a. Sekretariat Kabinet melakukan pemantauan terhadap beberapa bendungan PSN terbangun, antara lain Bendungan Jatigede dan Bendungan Bajulmati</p> <p>b. Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan jaringan irigasi utama (primer dan sekunder) baru belum teranggarkan atau pelaksanaannya belum selesai dikarenakan terkendala pembebasan lahan dan persetujuan penganggaran dari pusat 2) Pembangunan jaringan irigasi baru di wilayah bendungan terbangun masih mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat (melalui DAK Fisik) dan tidak dianggarkan dalam APBD <p>c. Rekomendasi kepada Presiden (disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0788/Seskab/08/2023):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) K/L terkait agar memprioritaskan pembangunan jaringan irigasi pada DI Premium dalam

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
		pelaksanaan program pembangunan sektor irigasi Tahun Anggaran berjalan dan Tahun Anggaran 2024, termasuk dalam Tahun Anggaran periode RPJMN 2024-2029

2. Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum

Selama tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum telah menerima 62 usulan RPermen. Terhadap 62 RPermen tersebut, setelah dilakukan kajian 20 diantaranya tidak membutuhkan Persetujuan Presiden. Beberapa RPermen yang diproses:

Tabel 11 : Matriks IRO 2

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor	<p>a. Menteri Perhubungan kepada Presiden melalui surat Nomor HK 202/8/10 PHB 2023, tanggal 1 September 2023 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor (Rpermen)</p> <p>b. Hasil kajian atas permohonan persetujuan RPermen disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.830/Seskab/09/2023 tanggal 11 September 2023. Sedangkan surat persetujuan penetapan RPermen dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0450/Seskab/MARVES/09/2023 tanggal 11 September 2023.</p>
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	<p>a. Menteri Perhubungan kepada Presiden melalui surat Nomor: HK 202/9/18 PHB 2023, tanggal 7 November 2023 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden untuk penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (RPermen).</p> <p>b. Hasil kajian atas permohonan persetujuan RPermen disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.1059/Seskab/11/2023 tanggal 15 November 2023. Sedangkan surat persetujuan penetapan RPermen dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0569/Seskab/MARVES/11/2023 tanggal 16 November 2023.</p>
3.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Bangunan Gedung Cerdas	<p>a. Menteri PUPR kepada Presiden melalui surat Nomor: HK 0101-Mn/2271, tanggal 23 Oktober 2023 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden untuk penetapan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Bangunan Gedung Cerdas (RPermen).</p>

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
		b. Hasil kajian atas permohonan persetujuan RPermen disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.1002/Seskab/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023. Sedangkan surat persetujuan penetapan RPermen dimaksud telah disampaikan kepada Menteri PUPR melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0533/Seskab/Marves/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

3. Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum

Pada IRO 3 di tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum telah menghasilkan 5 Rekomendasi dengan berbagai topik/isu. Sebagian contoh rekomendasi IRO 3 sebagai berikut:

Tabel 12 : Matriks IRO 3

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1.	Penyelesaian pengoperasian KA Bandara Soekarno-Hatta	<p>a. Sekretariat Kabinet melakukan koordinasi dengan PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) terkait pengelolaan KA Bandara setelah pengambilalihan pengelolaan oleh PT KCI dari PT Railink pada tanggal 1 Januari 2023</p> <p>b. Volume penumpang KA Bandara tahun 2023 (Jan-Sep) sebesar 1.389.188 penumpang. Kendala yang dihadapi oleh operator KA Bandara yaitu meskipun terdapat kenaikan rata-rata harian volume penumpang sebesar 30% selama masa promo tarif KA Bandara, tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan PT KCI dari penumpang. Sehingga berdampak negatif terhadap finansial perusahaan karena tarif ideal untuk relasi Manggarai – Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp100.000. Untuk mengurangi beban operator diperlukan dukungan dari Pemerintah.</p> <p>c. Hasil koordinasi dengan PT KCI disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor B.0692/MARVES/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penyampaian Hasil Koordinasi Pengelolaan Kereta Bandara Soekarno-Hatta, agar dapat dikoordinasikan untuk penyelesaian permasalahan serta menjadi bahan masukan untuk dibahas dalam Rapat Terbatas lanjutan tentang integrasi moda transportasi publik di wilayah Jabodetabek</p>
2.	Optimalisasi Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman	<p>a. Sekretariat Kabinet melakukan pemantauan terhadap optimalisasi penggunaan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman (BUJBS) pada 8 Juni 2023 di Purbalingga. terhadap hasil pemantauan optimalisasi BUJBS diadakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Kementerian/Lembaga terkait guna merumuskan kebijakan terhadap keberlangsungan BUJBS pada khususnya, dan Bandara-Bandara lain yang sejenis.</p> <p>b. Kesepakatan rapat:</p>

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Perhubungan akan melakukan kajian secara komprehensif keberadaan bandara-bandara di Pulau Jawa terutama dari segi ekonomi termasuk mengusulkan kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menentukan status bandara sebagai bagian dari evaluasi keberadaan bandara secara menyeluruh. 2) Terkait dengan pelaksanaan kajian agar diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. 3) Hasil kajian akan dibahas dengan Kementerian/Lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet. 4) Hasil Rapat disampaikan kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) melalui Surat Seskab Nomor B.0428/Seskab/MARVES/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023
3.	Pemanfaatan bendungan PSN terbangun sebagai sumber irigasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Kabinet melakukan pemantauan terhadap beberapa bendungan PSN terbangun, antara lain Bendungan Jatigede dan Bendungan Bajulmati b. Permasalahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan jaringan irigasi utama (primer dan sekunder) baru belum teranggarkan atau pelaksanaannya belum selesai dikarenakan terkendala pembebasan lahan dan persetujuan penganggaran dari pusat 2) Pembangunan jaringan irigasi baru di wilayah bendungan terbangun masih mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat (melalui DAK Fisik) dan tidak dianggarkan dalam APBD c. Rekomendasi: K/L terkait agar memprioritaskan pembangunan jaringan irigasi pada DI Premium dalam pelaksanaan program pembangunan sektor irigasi Tahun Anggaran berjalan dan Tahun Anggaran 2024, termasuk dalam Tahun Anggaran periode RPJMN 2024-2029. Dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor: M.0279/MARVES/08/2023.

4. Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum Pada IRO 4 di tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum telah menghasilkan 6 Rekomendasi dengan berbagai topik/isu. Sebagian contoh rekomendasi IRO 4 sebagai berikut:

Tabel 13 : Matriks IRO 4

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Presiden 109/2020 tentang	a. Sekretariat Kabinet melakukan pengawalan terhadap proyek dan program PSN, terutama dalam rangka

No	Isu	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
	Perubahan Kedua atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	mengawal Arahan Presiden yang berkaitan dengan PSN; b. Beberapa proyek dan program yang dikawal antara lain: 1) Program Pengembangan Jalan Exit Toll : perlu percepatan 2) Program Pengembangan Superhub : berjalan dengan catatan

5. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Indeks revisi program anggaran mengukur kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Semakin sedikit revisi yang diajukan Asdep Perhubungan dan Pekerjaan Umum maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep. Revisi dimaksud merupakan revisi kewenangan DJA, Kanwil DJPB dan KPA Sekretariat Kabinet kecuali revisi yang disebabkan APBNP. Adapun capaian Asdep Perhubungan dan Pekerjaan Umum terhadap sasaran 3 indikator 1 tahun 2023 adalah 2 kali revisi dengan predikat A (Sangat Baik).

6. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Asdep Perhubungan dan Pekerjaan Umum indikator ini memastikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Asdep Perhubungan dan Pekerjaan Umum sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan PerDJPB Nomor 5/PB/2022 Pasal 9 ayat (3) persentase target serapan per triwulan sebesar 15%, 50%, 70% dan 90%. Adapun capaian Asdep Perhubungan dan Pekerjaan Umum terhadap sasaran 3 indikator 2 tahun 2023 adalah 99,92%.

B. Realisasi Anggaran

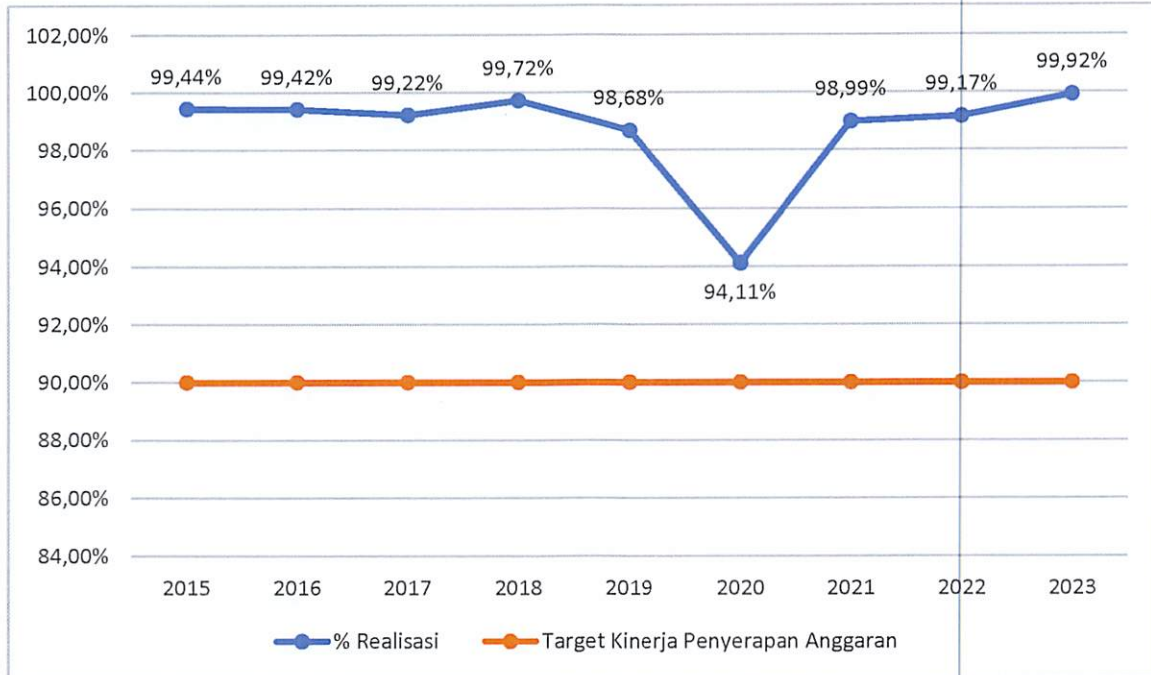
Selama pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2023, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum telah mengajukan 2 (dua) kali revisi anggaran. Revisi tersebut dilakukan dikarenakan adanya *automatic adjustment* serta optimalisasi anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet. Adapun besaran anggaran setiap kegiatan setelah dilakukan revisi adalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 14 : Matriks Realisasi Anggaran

Rincian Output	Anggaran Sesuai DIPA TA 2023	Automatic Adjustment	Optimalisasi Anggaran Sekretariat Kabinet	Anggaran Akhir	Realisasi	% Realisasi dari Anggaran Akhir
Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp684.346.000,00	Rp1.349.000,00 (0,19% dari DIPA)	Rp166.171.000,00 (24,28% dari DIPA)	Rp516.826.000,00 (75,52% dari DIPA)	Rp516.414.365,00	99,92%
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp315.654.000,00	Rp98.651.000,00 (31,25% dari DIPA)	Rp91.301.000,00 (28,92% dari DIPA)	Rp125.702.000,00 (39,82% dari DIPA)	Rp125.580.656,00	99,90%
	Rp1.000.000.000,00	Rp100.000.000,00 (10% dari DIPA)	Rp257.472.000,00 (25,74% dari DIPA)	Rp642.528.000,00 (64,25% dari DIPA)	Rp641.995.021,00	99,92%

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023



Gambar 1 : Tren Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran

Dalam rangka menunjang pencapaian indikator kinerja, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA Sekretariat Kabinet Tahun 2023. Dijelaskan pada Tabel 14, besaran pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan adanya kebijakan *automatic adjustment* anggaran maka pagu anggaran Asisten Deputi Perhubungan dan Pekerjaan Umum direvisi menjadi Rp900.000.000,00 (turun 10,00%) serta adanya kebijakan optimalisasi anggaran Sekretariat Kabinet sebesar Rp257.472.000,00 (25,74% dari DIPA). Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2016 hingga 2022, realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada tahun 2023 paling tinggi yaitu sebesar 99,92%.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja

02 Januari 2023 - Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum
Hennie Ambar Susilowati, S.H.

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 87,28% Output:	Outcome: 96,72% Output:	Outcome: 104,17% Output:	Outcome: 104,17% Output:
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 92,58% Output:	Outcome: 104,17% Output:	Outcome: 104,17% Output:	Outcome: 104,17% Output:
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: 104,17% Output:	Outcome: 104,17% Output:
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104,17% Output:	Outcome: 104,17% Output:	Outcome: 104,17% Output:	Outcome: 104,17% Output:
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: 175% Output: 175%
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Outcome: 83,83% Output:	Outcome: 79,22% Output:	Outcome: 78,36% Output:	Outcome: 88,06% Output: 73,82%

Gambar 2 : Tangkapan Layar Dashboard SIKT

Berdasarkan pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran indikator dapat dikategorikan “memuaskan” (mencapai 104,17%) sesuai pada indikator dalam Panduan Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet (P4KIN). Pencapaian tersebut didukung oleh peran serta seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum, serta faktor lainnya seperti:

- Monitoring atas pencapaian kinerja yang dilakukan setiap bulannya;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam analisis kinerja pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum.

Disamping pencapaian tersebut, masih terdapat beberapa kendala antara lain keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, seperti alat tulis komputer.

BAB IV
Kesimpulan

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum tahun 2023 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas manajemen kabinet di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang tertuang dalam indikator kinerja utama Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LKj sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Secara umum, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum tahun 2023 sudah sangat baik terlebih saat ini Pemerintah sedang dalam masa *recovery* dari dampak pandemi COVID-19. Dengan dicapainya capaian kinerja 100% menjadi bukti bahwa meskipun ada tantangan yang besar, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dapat beradaptasi dan tetap profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 1 : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hennie Ambar Susilowati, S.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan tindakan terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Hennie Ambar Susilowati, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp684.346.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	

1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum
Total Anggaran
Rp315.654.000,-
Rp1.000.000.000,-
Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Hennie Ambar Susilowati, S.H.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2 : Matriks Capaian Kinerja

Program	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)		
Kegiatan	3. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407) 4. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408)		
Sasaran Kegiatan	3. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 4. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum		
Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%
3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 %	100 %	104,17%
4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 %	100 %	104,17%
5. Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	B (5-8 kali revisi)	A (2 kali revisi)	

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Program	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)		
Kegiatan	3. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407) 4. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408)		
Sasaran Kegiatan	3. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 4. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum		
Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
6. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	90% - Rp538.020.900,00	99,92% - Rp641.995.021,00 (pagu setelah optimalisasi)	111,02%

Lampiran 3 : Matriks Penyerapan Anggaran

Rincian Output	Anggaran Sesuai DIPA TA 2023	Automatic Adjustment	Optimalisasi Anggaran Sekretariat Kabinet	Anggaran Akhir	Realisasi	% Realisasi dari Anggaran Akhir
Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp684.346.000,00	Rp1.349.000,00 (0,19% dari DIPA)	Rp166.171.000,00 (24,28% dari DIPA)	Rp516.826.000,00 (75,52% dari DIPA)	Rp516.414.365,00	99,92%
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp315.654.000,00	Rp98.651.000,00 (31,25% dari DIPA)	Rp91.301.000,00 (28,92% dari DIPA)	Rp125.702.000,00 (39,82% dari DIPA)	Rp125.580.656,00	99,90%
	Rp1.000.000.000,00	Rp100.000.000,00 (10% dari DIPA)	Rp257.472.000,00 (25,74% dari DIPA)	Rp642.528.000,00 (64,25% dari DIPA)	Rp641.995.021,00	99,92%

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI NOMOR 4 TAHUN 2018**

No	Pernyataan	Checklist	Halaman
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	